



Otonomi Strategis Kebijakan Luar Negeri Turki di Tengah Persaingan Pengaruh Amerika Serikat dan Rusia di Timur-Tengah

Tristan Lazari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia

Email Korespondensi: tristanlazary007@gmail.com

Abstrak

Setelah perang dingin usai dinamika politik di kawasan Timur-Tengah mulai berubah. Hal ini berimplikasi terhadap nilai strategis negara anggota NATO khususnya negara yang berbatasan langsung dengan Uni Soviet salah satunya Turki. Kebijakan politik luar negeri Turki pasca perang dingin secara bertahap berubah terutama pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan. Pada awalnya Erdogan mengakomodasi kebijakan para pendahulunya khususnya yang berkaitan dengan hubungan strategis dengan negara barat. Namun pada akhir dekade 2010an kawasan Timur tengah dihantam oleh gerakan revolusi yang memberikan efek domino terhadap stabilitas politik negara Arab yang berujung pada perang sipil. Hal tersebut menjadi salah satu penentu kebijakan politik luar negeri Turki yang mulai mengalami pergeseran dan mulai menerapkan otonomi strategis dalam kebijakan luar negerinya. Artikel ini menjelaskan dinamika politik di kawasan Timur Tengah yang berimplikasi terhadap interaksi Turki dengan negara hegemon seperti Amerika Serikat dan Rusia. .

Kata kunci: Separatis Kurdi, Ketahanan Energi, Integritas Kedaulatan, Operasi Militer, Otonomi Regional

Strategic Autonomy of Turkey's Foreign Policy Amid the Competition for Influence between the United States and Russia in the Middle East

Abstract

After the cold war is over the political dynamic in middle east has changed. This has strategic implication for NATO member countries, especially those who directly border with Soviet Union. Turkish post cold war foreign policy took gradual shifting especially during Erdogan administration. Initially Erdogan accommodate the policies of his predecessors especially those related to strategic relations with western countries. However, in the late 2010s, the Middle East was hit by revolutionary movements that had a domino effect on the political stability of Arab countries that lead to civil war. This became one of the determining factors in Turkey's foreign policy, which began to shift and implement strategic autonomy in its foreign policy. This article explains the political dynamics in the Middle East that have implications for Turkey's interactions with hegemonic powers such as the United States and Russia.

Keywords: Kurdish Separatists, Energy Security, Sovereign Integrity, Military Operations, Regional Autonomy

How to Cite: Lazari, T. (2026). Otonomi Strategis Kebijakan Luar Negeri Turki di Tengah Persaingan Pengaruh Amerika Serikat dan Rusia di Timur-Tengah. *Tristan Lazari. Empiricism Journal*, 7(1), 453-463. <https://journal-center.litpam.com/index.php/empiricism/article/view/4930>



<https://doi.org/10.36312/ej.v7i1.4930>

Copyright© 2026, Lazari.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.



PENDAHULUAN

Pasca era perang dingin struktur politik internasional secara perlahan memasuki era multi-polar. sejumlah negara baru muncul yang dulunya merupakan bagian dari Uni Soviet dan juga mulai terjadi pergesaan aliansi politik diantara negara aliansi Pakta Warsawa. Sejumlah negara Eropa timur secara bertahap bergabung dengan aliansi barat dengan menjadi bagian dari Uni Eropa dan bahkan bergabung menjadi anggota seperti negara eks Soviet di kawasan Baltik, Ceko, Slovakia, dan Hungaria kini menjadi bagian dari Uni Eropa. Keputusan negara tersebut bergabung dengan Uni eropa bisa dianggap sebagai keputusan strategis ekonomi, negara Eropa Timur berharap mereka mampu meningkatkan taraf ekonominya dengan bergabung dengan blok ekonomi barat. Selain itu, meskipun Uni Soviet sudah tidak lagi ada, namun persepsi kuat mereka mengenai Rusia sebagai ancaman regional masih melekat kuat, dengan kultur non demokratisnya serta kebijakan politik Rusia yang menggunakan sektor energi untuk menekan lawan politiknya di Eropa, menimbulkan

kekhawatiran sejumlah negara Eropa Timur atas disrupsi proses demokratisasi yang telah berjalan selama ini (Ronald D., 2008).

Rusia dianggap sebagai pesaing blok barat, anggapa bahwa Rusia masih Dalam struktur unipolar, Amerika kini menjadi penyandang status negara super power tunggal mulai menggeser peran strategisnya di lingkup internasional. NATO dimasa perang dingin memiliki doktrin deterrence untuk mengahalu ancaman nuklir Uni Soviet dan juga strategi tempur untuk menghadapi perang terbuka dan perang nuklir melawan Uni-Soviet. Maka tidak heran jika sejumlah negara NATO garda terdepan seperti Turki memiliki peran penting menghalau pengaruh Uni-Soviet di tiga kawasan sekaligus Laut Hitam, Laut Meditteran Timur, dan Tmur Tengah. Peran strategis Turki dibuktikan dengan sejumlah fasilitas militer Turki yang terintegrasi dengan NATO seperti pusat komando pasukan angkatan darat yang berada di Izmir, pangkalan angkatan udara Konya dan Incirlik yang terintegrasi dengan NATO dimana saat ini pangkalan tersebut digunakan untuk menyokong operasi militer anti-terror NATO di Timur Tengah dan merupakan fasilitas strategis terdepan yang berfungsi sebagai *Airborne Early Warning & Warning Air Force* (NAEW&C) yang digunakan untuk me-deploy pesawat AWACS. Selama era perang dingin pangkalan udara Incirlik menjadi tuan rumah bagi pesawat pengebom strategis B-61 yang mampu memuat hulu ledak nuklir, selain itu pada masa krisis misil Kuba, NATO menempatkan hulu ledak nuklir *Intermediate Balistic Missile* (IRBM) di pangkalan udara Cigli sebagai *deterrence* dari serangan Soviet di kawasan selatan (*Southern Flank*) NATO (M., 2022).

Namun setelah usainya perang dingin Turki mulai merestrukturisasi arah kebijakan luar negerinya. Beberapa faktor salah satunya yaitu alasan keamanan internal menjadi perhatian utama karena hal ini menyangkut masalah integritas wilayahnya. Republik Turki modern dibentuk diatas fondasi ideologi Kemalisme, yang dimana secara ekonomi negara ini menganut sistem *etatism*. Yaitu sistem ekonomi yang dipimpin dimananegara mengontrol semua arah pembangunan ekonomi hingga mengatur sektor industri dan investasi, untuk mengkoordinasi pertumbuhan politik. Namun hal tersebut justru mengakibatkan pertumbuhan menghambat pertumbuhan ekonomi dikarenakan iklim investasi yang tidak kompetitif dan kurangnya pekerja yang memiliki berketerampilan tinggi. berakhirnya era perang dingin yang disertai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Rusia secara bertahap terutama masa Presiden Vladimir Putin, Rusia mulai dilirik sebagai partner yang kredibel dalam bidang ekonomi khususnya di sektor energy, dan juga di bidang pertahanan. Selain itu China muncul sebagai emerging super power, dimana sejumlah negara asia berjuang menghadapi krisis finansial tahun 1997, perekonomian China justru cenderung stabil bahkan di awal abad 21 china mulai gencar melakukan Foreign Direct Invesment disejumlah negara di Asia Tenggara. Kemunculan China sebagai emerging power dan kembalinya peran domain Rusia di masa kepresidenan Vladimir Putin mulai menggeser secara perlahan dominasi unipolar Amerika Serikat di Struktur Politik global. Hal ini tidak terlepas dari fokus aliansi barat yang beralih menjadikan terorisme Islam sebagai ancaman utama, sehingga memberikan ruang luas bagi China dan Rusia untuk bermanuver dalam politik dan ekonomi internasional. Peran dominan Amerika Serikat mulai tergeser dengan ditandainya sejumlah negara sekutunya dan negara non-blok mulai menemukan partner dagan dan perekonomian baru untuk menggantikan peran tradisional Amerika dan Jepang, Turki mulai merestrukturisasi kebijakan politik luar negerinya dengan melakukan kerjasama multi-bidang dengan Rusia dan China, meskipun begitu Turki masih memelihara kerjasama strategisnya dengan barat, selain itu Turki juga masih berharap pada keanggotaanya dengan Uni Eropa untuk terintegrasi lebih dalam dengan perekonomian barat.

METODE

Penelitian ini akan berfokus pada unit analisis aktor negara yaitu Turki dengan menggunakan paradigma neo-realisme yang diusung oleh Kenneth Waltz. Pendekatan ini dipilih oleh penuls untuk menjelaskan dinamika interaksi antar aktor negara di kawasan Timur-Tengah. Pada artikel ini penulis akan memfokuskan penelitiannya pada kebijakan luar negeri otonomi Turki yang dijalankan oleh pemerintahan Perdana Menteri/Presiden Erdogan yang didukung oleh partai AKP (*Adalet ve Kalkınma Partisi*, Partai Keadilan & Pembangunan). Penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan

menggunakan data sekunder berupa artikel ilmiah, dan referensi dari berita daring arus utama memfokuskan pada dinamika hubungan politik Turki dengan Amerika Serikat, bagaimana transformasi hubungan kedua negara tersebut pada awal kepemimpinan Erdogan pada tahun 2002, hingga mengidentifikasi motivasi Turki mengubah untuk arah kebijakan politik luar negerinya menjadi lebih *assertive* di dekade 2010 terutama pada saat peristiwa Arab spring melanda sejumlah negara Arab di Afrika Utara dan Timur Tengah yang berimplikasi pada Turki mulai menjalankan politik luar negeri dua kaki dengan menjalin hubungan strategis dengan Rusia yang menjadi rival di perang sipil Suriah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam paradigma realisme dimana lingkungan politik internasional merupakan anarki dimana tidak ada otoritas paling atas yang mengatur hubungan internasional, maka satu satunya alasan utama sebuah negara itu untuk tetap bertahan hidup. Bertahan hidup sebagai mana diutarakan oleh sejumlah akademisi realisme seperti Morgenthau, Waltz dan Mearsheimer, merupakan instrumen utama *self-help* yang berarti mekanisme rasional untuk meningkatkan kapasitas negara dari kepunahan dalam menghadapi ancaman. Menurut Kenneth Waltz penggerak perilaku dari sebuah aktor bukanlah sebuah meraih sebuah kekuasaan namun, perilaku aktor ditentukan dari faktor eksternal yaitu struktur internasional. dalam paradigma neo-realisme asumsi utamanya adalah negara, sebagai aktor utama yang hidup didalam sistem politik internasional yang memiliki karakteristik tertentu dimana mekanisme *self help* merupakan mekanisme bertahan dalam struktur anarki, dan distribusi kekuatan diantara aktor negara yang tidak terdistribusi berimbang (Waltz, 1979). Tidak seperti realisme klasik dimana struktur yang anarki dibentuk oleh perilaku aktor, neo-realisme menekankan pada peran struktur yang membentuk perilaku aktor. Perilaku aktor dibentuk melalui hubungan antara struktur dan aktor, dimana eksistensi sebuah struktur internasional membatasi perilaku pada aktor, sehingga aktor memiliki dihadapkan dua pilihan yaitu untuk bertahan dalam struktur yang anarki atau menjadi hegemon. Karakteristik dari sebuah struktur internasional tidak terlepas dari bagaimana sistem yang berlaku dijalankan oleh karakteristik dan kemampuan relatif dari aktor tersebut. Dalam struktur yang anarki ada interaksi antar aktor negara seperti kerjasama dalam bidang ekonomi sebagai contohnya. Namun struktur yang anarki membuat interaksi diliputi oleh dilemma keamanan, karena tujuan utamanya adalah bertahan dan kekuasaan. Hal ini menyebabkan aktor negara memiliki kepedulian terhadap kapabilitas dalam kemampuan mereka dibidang tertentu dan hal itu mendorong aktor negara untuk meningkatkan kapabilitas mereka dalam hal ekonomi atau militer sebagai contohnya (Waltz, 1979). Maka dari itu disparitas kekuatan dan kapabilitas dalam struktur internasional berlaku. negara yang merasa tidak diuntungkan akan berusaha mengubah status quo.

Dalam paradigma neo-realisme ada dua metode untuk menghadapi ancaman dari aktor lain, yang pertama yaitu *internal balancing* meliputi penguatan kapasitas militer, seperti pengadaan persenjataan canggih dan pembangunan industri pertahanan untuk mengurangi ketergantungan dengan negara lain, serta menjamin rantai pasokan senjata. Metode kedua adalah *external-balancing*, yang dilakukan dengan melakukan aliansi dan kerja sama strategis dengan negara lain, biasanya negara super power yang merasa kehadirannya terancam dengan munculnya potensi super power baru. *External-balancing* memungkinkan pihak yang berkoalisi untuk melakukan pembagian beban dan peran strategis dalam membendung ancaman aggressor. sebagai Namun *external-balancing* ini bukan berarti tanpa resiko. Biasanya terdapat perbedaan pandangan mengenai pembagian beban diantara negara anggota koalisi (Mearsheimer, 2001). Kasus ini dapat dilihat dari penolakan negara NATO atas usulan Presiden Trump untuk menaikkan anggaran pertahanannya hingga 5 persen dari APBN. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menolak usulan tersebut, karena tidak sesuai dengan kondisi keuangan negara tersebut, dan mengusulkan dmengusulkan sistem yang lebih flexible, sementara Sekertaris Jendral Nato Mark Rutte mengusulkan kenaikan hanya sebesar 3,5 persen (Jones, 2025). Selain itu kemungkinan resiko *abandonment* atau pengabaian dari negara sekutu ketika ancaman aggressor tidak lagi dianggap nyata maka negara yang tadinya terancam akan ditinggal oleh koalisinya.

Resiko ini bisa dilihat dari contoh Turki dalam menghadapi ancaman separatisme Kurdi yang selama beberapa dekade terakhir menjadi ancaman integritas wilayah kedaulatannya, di kasus ini solidaritas NATO mulai diragukan. Pada perang Suriah Amerika Serikat beserta anggota NATO lainnya menolak memberikan bantuan secara politik maupun militer kepada Turki yang menghadapi ancaman integritas wilayah kedaulatannya dari kelompok milisi Kurdi PYD dan ISIS. Jerman memberlakukan embargo persenjataan Turki yang berdampak pada berhentinya kerjasama joint venture perusahaan Turki BMC dengan Rheinmetall dalam pengembangan MBT nasional Tank Altay. Embargo diberlakukan atas dasar keterlibatan operasi militer Turki yang menargetkan ISIS dan milisi Kurdi (Elmali-Karakaya, 2022). Pada 2015 disaat ancaman ISIS menghantui perbatasan selatan Turki, selain itu pesawat tempur Rusia beberapa kali menoreobs wilayah udara Turki untuk melakukan operasi militer di Suriah (Ege Bekdil, 2015). Amerika tidak hanya meninggalkan Turki dalam menghadapi kelompok yang mengancam integritas wilayah kedaulatannya, namun juga memberikan dukungan militer dan politik untuk kelompok milisi Kurdi PYD sebagai kolaborator menghadapi ancaman ISIS di Suriah Sementara itu Amerika cenderung menolak untuk mendukung Turki dalam menghadapi ancaman separatisme kelompok Kurdi (Demir, 2024).

Peran struktur politik menekan aktor berperilaku sesuai dengan norma struktur politik yang berlaku. Maka dari itu manuver aktor negara banyak dipengaruhi oleh kemampuan material yang dimiliki. Tidak seperti negara super power yang merupakan aktor dominan dalam politik internasional dan memiliki kapabilitas material yang mumpuni, negara middle-power harus pandai bermanuver dalam berinteraksi antar aktor negara. Dalam neo-realisme perilaku menyimpang aktor negara bisa ditoleransi dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang tentu saja perilaku tersebut akan mengundang sanksi yang diterapkan dari struktur politik yang berlaku (G. Thies, 2010). Kondisi tersebut sangat sesuai untuk menggambarkan kondisi Turki yang dikenakan sanksi CAATSA (*Countering America's Adversaries Through Sanctions Act*) oleh Amerika Serikat dan di keluarkan dari proyek pembangunan pesawat tempur F-35 akibat keputusannya membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Terlebih S-400 tidak kompatibel dengan struktur pertahanan NATO (Yetim & Hazar, 2022), Itu sebabnya itu salah satu kebijakan pertahanan Turki pasca perang dingin adalah dengan membangun industri pertahanan dalam negerinya untuk mengurangi ketergantungannya dengan negara barat.

Struktur internasional membentuk perilaku aktor berdasarkan apa yang dimilikinya bukan apa yang diinginkannya, maka dari itu diskursus dalam neo-realisme bukan lagi seputar dominasi atau *survive* dalam sistem yang anarkis, tetapi bagaimana aktor memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk memiliki otonomi dalam interaksi politik internasional. penekanan pada otonomi berakar bahwa ancaman terhadap aktor bukan lagi berupa ancaman terhadap eksistensi mereka seperti yang dikemukakan oleh Morgenthau, Mearesheimer, dan Waltz, namun terhadap distribusi kekuatan, dimana anarkis bukan lagi didefinisikan kekosongan otoritas yang lebih tinggi diatas negara, namun pemerataan distribusi kekuasaan yang tidak merata menyebabkan sejumlah aktor tidak bisa memiliki kemandirian dan otonomi dalam menjalankan arah politiknya. Dalam neo-realisme definisi anarki menekankan pada hubungan antara distribusi kekuatan dengan aktor yang memiliki motivasi yang disebabkan oleh struktur yang berlaku untuk memiliki otonom dalam menentukan kebijakan politiknya dan menjalankannya secara independen dengan mengurangi ketergantungan seminimal mungkin kepada otoritas lain (Harknett & Yalcin, 2012). Neo realisme menciptakan kondisi sebuah persaingan antara struktur dengan aktor dimana aktor yang berkeinginan untuk menjalankan kebijakan politik independen, dimana struktur internasional membatasi manuver politik aktor dan aktor pun beradaptasi dengan dinamika politik didalam struktur tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sifat struktur internasional yang dinamis, maka hal ini rentan terhadap pengaruh yang terjadi antara interaksi antar unit yang sering kali menimbulkan benturan. Keterbatasan aktor dalam menerjemahkan perilaku aktor lainnya apakah defensif, ofensif, atau revisionis menyebabkan struktur internasional rentan terhadap terjadinya konflik besar, karena konflik seperti perang terjadi karena adanya benturan antara pengaruh struktur pada motivasi aktor untuk menjadi independen dengan melakukan perubahan mendasar pada struktur tersebut (Kuik, 2016). Dilema keamanan terjadi ketika postur defensif aktor ditanggapi oleh aktor lain yang memiliki motivasi tertentu sebagai tindakan ofensif. Sementara itu postur defensive sebuah

aktor juga dipicu dari persepsi terhadap aktor lain yang menjalankan kebijakan politik revisionis yang memiliki pengaruh terhadap struktur yang berlaku. Namun, persebaran umlah aktor dengan kapabilitas yang relative sama, menciptakan keadaan yang realitif stabil meskipun tidak sepenuhnya bebas dengan konflik. Hal ini disebabkan kapabilitas relative yang sama akan mengurangi tingkat otonomi suatu aktor dalam menjalankan kebijakannya dan menggunakan segala sumber dayanya lebih berhati hati karena akan susah menhadapi berbagai aktor dalam satu isu politik yang sama.

Diversifikasi Energi Sebagai Strategi Ketahanan Energi Turki

Hedging merupakan istilah baru dalam hubungan internasional yang muncul dari dunia finansial yang mendeskripsikan keputusan sebuah perusahaan untuk melakukan investasi yang bertujuan untuk mengantisipasi kerugian investasi di sektor lain dengan tujuan untuk meminimalisir kerugian sekecil mungkin. Hal ini bisa dianalogikan dengan tidak menaruh seluruh telur dalam satu ranjang. *Hedging* dalam politik internasional merupakan manuver politik yang biasanya dilakukan oleh negara middle power dengan menggabungkan unsur *balance of power* dan *bandwagoning*. Dengan kata lain sebuah negara berusaha mendiversifikasikan kerjasama internasionalnya dengan aktor selain sekutu tradisional mereka, termasuk dengan kompetitor mereka. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan benefit semaksimal mungkin dimasa hubungan baik mereka baik dengan sekutu tradisional ataupun dengan kompetitor dengan negara yang dianggap berbahaya dengan mengurangi dampak negatif semaksimal mungkin dengan menyiapkan strategi darurat serta meningkatkan daya tawar mereka (Kuik, 2016). Metode *hedging* ini bisa di anggap strategi yang ambigu dan oportunis karena aktor negara yang memiliki otonomi secara pro-aktif melakukan kebijakan yang cukup beresiko dibawah ketidakentuan dinamika politik yang tidak menentu dengan bekerjasama dengan pihak kompetitor namun disaat yang sama mempersiapkan strategi untuk menghindari dampak negatif dalam kebijakan tersebut (Cheng-Chwee, 2024). Imbalan yang didapatkan melalui strategi hedging yang jelas memberi negara keleluasaan dalam melakukan kerjasama di multi-bidang seperti ekonomi, energy dan pertahanan dengan berkolaborasi dengan dua pihak yang berseberangan negara mampu meminimalisir efek negative dari dinamika hubungan antar negara. Namun tidak dipungkiri bahwa hedging juga memiliki resiko atas ketergantungan khususnya pada negara yang dianggap kompetitor dan berbahaya dan juga mampu merusak hubungan strategis dengan sekutu tradisionalnya. Maka dari itu kerjasama dengan negara kompetitor hanya sebatas transaksional.

Bisa disimpulkan bahwa *hedging* hampir serupa seperti *balance of power* dalam realisme, hanya saja strategi ini lebih menitik beratkan pada mengurangi resiko besarnya pengaruh suatu negara dalam sebuah kerjasama dengan menjalin kerja sama dengan negara lain atau ahkan dengan kompetitor, dan juga strategi *hedging* bukanlah strategi yang reaktif namun merupakan usaha dalam meraih otonomi dalam kebijakan politik. Aktor negara secara pro-aktif terlibat langsung ddalam kerjasama dengan dua negara super power yang berkompetitisi. Di zaman dimana struktur politik mulai menuju era multipolar, Turki tidak lagi menyelaraskan kebijakan politiknya dengan bergantung pada barat dan berharap pada keanggotaan Uni Eropa. Kini Turki secara pro-aktif mengamati dinamika geopolitik dan berusaha mendapatkan benefit dari rivalitas antara negara barat dengan Rusia dan Cina dimana saat ini Turki melakukan kerjasama strategis khususnya dibidang energy dengan Rusia dan ekonomi dengan Cina, namun tanpa sepenuhnya meninggalkan kerjasama strategis dengan sekutu tradisionalnya khususnya NATO dan kerjasama ekonominya dengan barat (kara, 2024).

Jika dilihat dari sudut pandang geografi Turki dikelilingi oleh negara tetangganya yang memiliki cadangan hydrocarbon yang cukup melimpah terutama cadangan gas alam (*Liquified Natural Gas*). Namun Turki sendiri merupakan net importir gas alam mengingat Turki tidak memiliki cadangan gas yang melimpah seperti negara tetangganya. Dua dekade yang lalu Turki mengimpor gas alam dari Rusia hingga 60 persen untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Namun dengan keberhasilan diversifikasi impor gas Turki mampu mengurangi ketergantungan gas Rusia hingga 37 persen di semester pertama tahun 2025. Hal ini menjadi kabar baik bagi ketahanan energi Turki mengingat Eropa mengalami krisis energy semenjak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 yang lalu. Keberhasilan

Turki dalam program diversifikasi impor energi ini berkat kerjasama bilateral jangka panjang dengan negara tetangga dalam menjamin pasokan kebutuhan energi dalam negerinya.

Meskipun Turki tidak memiliki cadangan hidrokarbon yang memadai, namun pemerintah Turki nampaknya sadar dengan keuntungan dari kondisi geografis strategis yang memungkinkan Turki menjadi *energy-hub* di kawasan Mediteran Timur. Proyek diversifikasi impor energi merupakan salah satu penopang utama dalam merealisasi visi tersebut. Turki telah membangun beberapa proyek pipa gas tidak hanya untuk memasok kebutuhan energi dalam negerinya tetapi juga untuk di ekspor. Turkstream, Trans Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP), South Caucasus Natural Gas Pipeline (SCP), Baku-Tbilisi-Erzurum Natural Gas Pipeline (BTE), Türkiye-Greece Natural Gas Interconnector (ITG), dan Pipa minyak Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) (Affair, n.d.). TANAP salah satu proyek utama dalam proyek ketahanan energi. Selesai pada tahun 2019 proyek senilai \$8.5 miliar yang menghubungkan ladang gas Shah Deniz Azerbaijan mampu menyuplai gas hingga 16 bcm, dimana 6 bcm untuk kebutuhan dalam negeri Turki dan 10 bcm diekspor ke Eropa melalui pipa gas Trans Adriatik (TAP, Trans Adriatik Pipeline). Proyek ini merupakan proyek joint venture antara perusahaan gas Azerbaijan SOCAR, kementerian energi Azerbaijan, dan perusahaan gas alam Turki BOTAS ("Turkey Open TANAP Gas Pipeline," 2018).

Turkstream merupakan proyek pipa gas penting lainnya antara Turki dengan Rusia. Proyek pipa gas ini sebenarnya cukup kontroversi. Pada awalnya proyek pipa gas jalur alternatif dengan mengalihkan jalur Ukraina ke Bulgaria, hal ini disebabkan oleh intervensi Rusia dalam urusan politik internal Ukraina dan aneksasi semenanjung Crimea. Namun pada 2014 Proyek ini gagal karena masalah sejumlah masalah birokrasi, ketidakanggapan Rusia untuk memnuhi ketentuan regulasi energi Uni Eropa serta kekhawatiran Uni Eropa atas politisasi ketahanan energinya oleh Rusia (Pirani, 2018). Pada 2016 Turki menjalin kesepakatan dengan perusahaan gas Rusia pembangunan pipa gas Turkstream melalui zona ekonomi eksklusif Turki. Keberadaan Turkstream cukup dilematis bagi Uni Eropa, disatu sisi mereka kesusahan menemukan pemasok energi alternatif disisi lain keberadaan Turkstream membuat mereka semakin susah untuk melepas ketergantungan pasokan gas dari Rusia. Hingga saat ini Turkstream menjadi satu satunya jalur pasokan gas Rusia ke Uni Eropa dan telah memasok gas sebanyak 63 bcm (*billion cubic meter*) sejak pipa tersebut beroperasi di tahun 2021 (Vladimirov, 2025).

Dari penjelasan diatas ada indikasi bahwa Turki sedang memproyeksikan pengaruh geopolitiknya sebagai *energy-hub* dalam distribusi gas alam dari kawasan Kaukasus menuju Eropa. Dengan begitu Turki diharapkan mampu memaksimalkan peran strategis geopolitiknya dengan menjalin kerjasama pembangunan infrastruktur pipa gas dengan beberapa negara tetangganya. Jika dilihat dari sisi salah satu negara pemasok yaitu Azerbaijan keterlibatan Turki dalam infrastruktur pipa gas memungkinkan Azerbaijan dan Rusia menjual gas alamnya ke pasar global. Bagi negara pemasok fokus utama mereka adalah mendapat akses market yang kompetitif, menjaga harga relatif stabil, dan meminimalisir potensi masuknya pemasok baru. Hal tersebut bisa terjamin dengan adanya stabilitas politik dan keamanan di negara transit, dalam kasus ini yaitu Turki. Stabilitas politik sangat penting mengingat investasi di bidang energi biasanya melibatkan investasi dari sektor perusahaan energi swasta, dan joint venture yang berorientasi profit sehingga menciptakan kerjasama strategis bagi stakeholder yang terlibat. Sementara itu keamanan pada permintaan dan pasokan yang berkaitan dengan negara transit, semakin sebuah negara bergantung pada perdagangan baik sebagai penjual yang bergantung pada pemasukan negara dan pembeli bagi konsumsi dalam negeri maka semakin rentan bagi mereka terhadap ancaman baik terhadap pasar global dan stabilitas geopolitik. Maka dari itu diversifikasi pemasok dan pasar sangat penting untuk menjaga stabilitas tersebut (Öge, 2019).

Jika diamati keberhasilan Turki dalam membangun infrastruktur pipa gas alam, negara ini nampaknya mampu menjalankan peran strategis dalam perdagangan energi di kawasan. Jika dipandang dari sudut ekonomi, negara transit energi merupakan sebuah fenomena dimana tidak hanya negara pemasok yang memiliki pengaruh di segi komersil, namun negara transit yang tidak memiliki cadangan hidrokarbon memiliki daya tawar dan pengaruh dalam menentukan harga, analisis kontrak, teknologi, pengaruh politik, hingga penentuan proyek pembangunan infrastruktur di masa mendatang (Bahgat, 2006). Tentu saja dengan

pertimbangan keuntungan dan stabilitas politik demi kelancaran investasi (Heinrich & Heiko Pleines, 2015). Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan strategi diversifikasi impor gas alam memberi Turki daya tawar sebagai negara transit. Rusia sebagai negara hegemon di kawasan nampaknya tidak bisa mempolitikasi sektor energi sebagai instrument diplomasi koersif seperti yang Rusia lakukan ke sejumlah negara Eropa Timur dan Baltik (Smith Stegen, 2011) untuk menekan Turki agar mengikuti kemauanya karena ketergantungan Turki pada pasokan energi Rusia relatif rendah dikarenakan diversifikasi pasokan hidrokarbon dari Azerbaijan, Iran dan Irak. Sebaliknya Turki mampu memainkan peran strategis bagi pasar Eropa dimana secara tidak langsung memperlabat Eropa memutus ketergantungan pasokan gas Rusia melalui pipa gas Turkstream sedangkan bagi Rusia dihadapkan dengan keterbatasan akses pasar akibat invasi Ukraina tidak memiliki ruang untuk bermanuver di sektor energi selain berpartner dengan Turki.

Implikasi Dinamika Politik Timur Tengah Terhadap Arah Kebijakan Luar Negeri Turki

Mantan menteri luar negeri Turki Ahmet Davutoglu dalam tulisannya yang berjudul *Stratejik Derinlik : Turkiye'nin Uluslararası Konumu* (Kedalaman Strategis : Posisi Internasional Turki) didalam tulisan ini dijabarkan bahwa keterikatan kondisi strategis geografi, identitas dan sejarahnya harus menjadi mesin penggerak utama dalam mengarahkan kebijakan luar negeri untuk memperdalam hubungan kerjasama di tingkat regional khususnya di bekas wilayah pengaruh Kesultanan Turki Usmani seperti di Timur Tengah, Balkan dan Laut Meditteran Timur. Pada pemerintahan sebelumnya Turki hanya dianggap sebagai aktor kelas dua di kawasan yang berfungsi baik sebagai jembatan antara dunia barat dengan Islam maupun sebagai pangkalan militer NATO di kawasan selatan untuk yang tugasnya sebagai ekskutor barat membendung pengaruh Uni Soviet di masa perang dingin. Menurut Davutoglu, Turki harus mengambil peran yang lebih pro-aktif dalam dunia politik nternasional (K. Yanik, 2023). Pada tingkat kawasan, pengaruh politik Turki mendapat persaingan dari sejumlah hegemoni lokal di Timur Tengah khususnya Turki harus bersaing dengan kekuatan politik lokal seperti Arab Saudi, Mesir, dan Israel yang telah memiliki basis pengaruh sejak era perang dingin. Sementara kawasan Eurasia dan Asia Tengah, meskipun Turki memiliki kesamaan dalam segi budaya dan agama daerah tersebut merupakan wilayah pengaruh Rusia secara politik dan ekonomi. Pada masa awal pemerintahan meskipun partai Erdogan AKP (*Adalet ve Kalkınma Partisi*, Partai Keadilan dan Pembangunan), mengusung Ideologi Islam, Turki tidak serta-merta menolak ideologi sekuler Kemalisme, yang sudah menjadi fondasi negara Turki modern. Di masa awal pemerintahan Erdogan kebijakan dalam dan luar negeri bergeser dari yang dulunya berfokus pada masalah keamanan internal berubah lebih berorientasi ke liberal demokrasi. Hal ini tidak terlepas untuk meningkatkan pengakuan Turki di komunitas barat khususnya Uni Eropa dimana Turki telah lama menjadi kandidat di organisasi multilateral tersebut. Turki melakukan reformasi birokrasi dan ekonomi dengan melakukan liberalisasi ekonomi dan keterbukaan untuk menarik investasi sehingga mampu menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi (Yavuz, 2022). Dibiidang keamanan Turki menerapkan kebijakan yang lebih diplomatis terutama dalam isu kelompok separatis Kurdi. Turki mengakui permasalahan Kurdi yang pada pemerintahan sebelumnya cenderung diabaikan dengan melakukan de-eskalasi konflik melalui dialog mengakui identitas masyarakat Kurdi dengan mengizinkan Bahasa Kurdi dalam pendidikan serta menjamin keamanan sosial ekonomi bagi mantan anggota PKK (*Partiya Karkerên Kurdistan*, Partai Buruh Kurdi) (Çelik, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Turki berkenginan mengatasi akar permasalahan isu separatis Kurdi melalui pendekatan yang lebih humanis, sehingga terbuka jalan untuk melakukan desekuritisasi pada isu tersebut. Pada invasi Amerika ke Irak pada tahun 2003 Turki menolak usulan pemerintah Irak menjadikan Turki sebagai basis operasi militer di wilayah utara Irak dan pada awal Arab Spring, Turki menjalin komunikasi intens dengan pemerintah regional Kurdi (KRG, *Kurdistan Regional Government*) di Irak untuk menjaga stabilitas keaman regional. Hal ini dilihat bahwa Turki serius dalam menerapkan kebijakan *zero enemy* di kawasan Timur-Tengah. Langkah tersebut dapat di nilai dari dua sisi yang pertama sebagai langkah untuk menarik elektorat dari segmen masyarakat Kurdi, yang kedua untuk menunjukkan ke negara barat bahwa Turki telah bertransformasi menjadi negara demokratis yang melindungi hak asasi kaum minoritas (Korhan Demir, 2024).

Kebijakan politik luar negeri Turki mulai mengalami pergeseran di dekade 2010 saat peristiwa Arab Spring mulai menghantam sejumlah negara Arab di Timur Tengah dan Afrika Utara. Ada dua faktor utama yang melatarbelakangi pergeseran tersebut. Pertama, menyangkut kondisi stabilitas keamanan internal dimana negara tetangga Turki di selatan, Suria dilanda perang sipil yang berkepanjangan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri (Akgül & Akgül, 2022). Kedua, pergeseran kebijakan politik tersebut tidak lepas dari ambisi otonomi strategis Turki untuk menjadi aktor dominan di Timur Tengah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, manifesto kebijakan politik luar negeri Turki yang dituangkan oleh Ahmet Davutoglu bahwa Turki harus menjadi pemimpin dalam perpolitikan global dan memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah. Ambisi untuk mewujudkan otonomi strategisnya, Turki berseberangan dengan kepentingan strategis Rusia dan Amerika di Suriah. Perang Suriah secara tidak langsung berimbas pada proses perdamaian dengan kelompok separatis Kurdi PKK (*Partiya Karkerên Kurdistanê*, Partai Buruh Kurdistan). PKK dituduh memiliki hubungan dengan kelompok milisi Kurdi PYD (*Partiya Yekîtiya Demokrat*, Partai Persatuan Demokratik) di Suriah Turki tidak bisa melakukan perundingan perdamaian dengan PKK disaat yang sama melakukan operasi militer melawan PYD di Suriah. Disamping itu kelompok separatis mengusulkan pembentukan daerah otonom dengan pemerintahannya sendiri yang ditolak oleh pemerintah Turki sebagai negara didalam negara (Korhan Demir, 2024). Persaingan pengaruh di Suriah tidak hanya terjadi antara Turki dan Rusia, namun juga dengan Amerika Serikat sekutu tradisionalnya di NATO. Amerika Serikat tidak mendukung keputusan Turki melakukan operasi militer untuk menumpas kelompok milisi PYD yang ditakutkan memperlemah upaya memberantas kelompok ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) di Suriah (Ioanes, 2022). Sementara itu Amerika justru memberikan bantuan militer ke PYD yang mengakibatkan hubungan kedua negara tersebut memburuk (McConnel, 2022). Di saat yang hampir bersamaan Amerika menarik sistem pertahanan udara Patriot disaat eskalasi perang Suriah memanas membuat pertahanan udara Turki menjadi rentan.

Tidak adanya dukungan dari sekutu tradisionalnya Turki memainkan strategi dua kaki untuk mervisi struktur kekuatan politik regional. untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Amerika Turki menjalin kerjasama strategis dengan Rusia. Pihak yang selama ini berseberangan dalam konflik Suriah, juga menjaga rezim Bashar al Assad tetap berkuasa. Militer Turki menjalin komunikasi intens dengan militer Rusia untuk melakukan operasi militer di wilayah Suriah. Dari koordinasi tersebut milisi dukungan Turki mampu merebut sejumlah kota penting yang diduduki oleh ISIS. Selain itu berkat koordinasi dengan Rusia, Rusia bersedia menarik sistem pertahanan udara sehingga Turki mampu melakukan operasi militer Olive Branch dan Euphrates Shield di wilayah Rojava yang menjadi basis militer PYD dan SDF (*Syria Defence Force*) (Köstem, 2020). Dari kesepakatan strategis dengan Rusia, Turki mampu mendirikan *safe zone* di Suriah utara untuk mengontrol arus imgrant, menyediakan tempat perlindungan bagi korban perang, dan memungkinkan pengungsi Suriah kembali ke kampung halamannya (Yilmaz, 2022). Perang sipil yang berkepanjangan mengakibatkan popularitas rezim Assad makin merosot, bagi Rusia mustahil untuk membendung kekuatan anti Assad sendirian maka dari itu Rusia bersedia melakukan koordinasi militer dengan Turki untuk menumpas ISIS. Mengingat Rusia dan Turki dan Rusia berada di pihak yang berseberangan, kerjasama tersebut hanyalah kerjasama strategis jangka pendek, Rusia tidak ingin kehilangan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah dan Mediterania jika rezim Assad jatuh. Sementara bagi Turki kerjasama Strategis dengan Rusia merupakan rencana untuk mempertegas otonomi strategisnya, dengan menjalankan operasi militernya tanpa bantuan dan koordinasi dari Amerika Serikat. Sama dengan Rusia koordinasi militer dengan Rusia merupakan strategi jangka pendek, namun kini Turki mampu memperkuat pengaruhnya di Suriah kelompok proxy dukunganya dan pembentukan *safe zone* di Suria utara.

Persepsi ancaman Turki sehubungan dengan perang Suriah berbeda dengan persepsi Amerika. Disinilah Amerika gagal memahami jalan berpikir Turki. Amerika memandang PYD merupakan mitra strategis dalam memerangi ISIS maka dari itu bantuan militer merupakan hal yang wajar. Di sisi lain Turki keberadaan milisi Turki di Suriah utara merupakan ancaman serius bagi integritas kedaulatannya. Bagi Turki apapun yang terjadi, mencegah berdirinya negara Kurdistan di di Suriah merupakan prioritas utama untuk mencegah terjadinya hal

serupa di dalam negeri. Di saat Turki membutuhkan instalasi pertahanan NATO, Amerika justru menarik sistem pertahanan udara NATO, itu sebabnya Turki memutuskan mengakuisisi sistem pertahanan udara Rusia S-400, meskipun harga mahal harus diterima Turki yaitu, di kenakan sanksi CAATSA dan dikeluarkan dari konsorsium pesawat tempur F-35 (Buhari Gulmez, 2020). Keresahan Turki bertambah ketika Amerika dituduh terlibat pada kudeta militer yang gagal pada 2016 dan penolakan Amerika untuk mengekstradisi Fetullah Gulen yang dianggap sebagai otak kudeta tersebut untuk diadili. Pada 2018 otoritas keamanan Turki menangkap seorang pastor berkebangsaan Amerika Andrew Craig Brunson atas tuduhan spionase dan kudeta yang gagal tersebut (Ioanes, 2022). Dilema yang ditimbulkan dari kebijakan Amerika di Suriah menimbulkan kekhawatiran Turki akan ditinggalkan oleh sekutu baratnya. Setelah perang dingin usai dengan hilangnya ancaman Uni Soviet begitu juga dengan nilai strategis Turki di kawasan, maka dari itu dinamika konflik di Suriah mendorong Turki menjalin hubungan strategis dengan Rusia.

Sebelum pemerintahan Erdogan, pengaruh militer dalam pemerintahan Turki cukup kuat dalam menentukan arah kebijakan politiknya. Seiring dengan diterimanya Turki menjadi kandidat anggota Uni Eropa pada tahun 2000 Turki mengadopsi *Democratic Control of Armed Force* (DECAF). Peran Dewan Keamanan Nasional (*Milli Güvenlik Kurulu*, MGK) yang diisi oleh pejabat militer mulai melemah dimana kebijakan pemerintah khususnya mengenai keamanan tidak perlu lagi mendapat keputusan dari MGK (Kutay, 2020). Maka hal tersebut secara tidak langsung memberi ruang bagi pemerintah Turki menentukan arah kebijakan politik luar negerinya. Hal tersebut bisa diamati dari dinamika keterlibatan Turki di konflik Suriah. Selama bertahun-tahun militer Turki berperan sebagai penjaga sekulerisme kerap kali mengintervensi keputusan pemerintah yang dianggap Tidak sejalan dengan ideologi Kemalisme (Ghariani, 2023). Maka dari itu peran dominan Neo-Ottomansisme telah menggeser Kemalisme sebagai identitas politik Turki yang baru baru dalam merancang otonomi strategis kebijakan politik luar negeri di masa depan

KESIMPULAN

Otonomi strategis yang diterapkan Turki dalam kebijakan politik luar negerinya merupakan bentuk dari negara *middle power* yang berusaha untuk merubah peta kekuatan politik di tingkat regional. Hubungan strategis dengan Rusia merupakan upaya Turki menutup kekurangannya di sektor energi dengan menggunakan letak strategis geografinya diversifikasi impor energi dengan negara lain untuk menaikkan kapasitas daya tawar Turki dihadapan hegemon lokal Seperti Rusia. Sementara itu perbedaan persepsi ancaman Amerika Serikat di Timur Tengah berimplikasi pada benturan kepentingan dengan Turki. Disatu sisi Amerika membutuhkan milisi Kurdi PYD untuk memberantas basis militer ISIS di Suriah, di sisi lain Turki menganggap PYD sebagai ancaman integritas kedaulatannya. Benturan tersebut menyebabkan Amerika Serikat tidak memberikan dukungan terhadap kebijakan politik Turki di Suriah. Hal tersebut mendorong Turki bermanuver politik dua kaki dengan menjalin kerja sama strategis dengan Rusia pada perang sipil Suriah. Perang sipil Suriah merupakan kesempatan bagi Turki tidak hanya untuk memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah tetapi juga untuk menyelesaikan permasalahan separatist Kurdi yang mengancam kedaulatannya selama empat dekade terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Affair, T. M. of foreign. (n.d.). *Turkiye's International Energy Strategy*.
<https://www.mfa.gov.tr/turkeys-energy-strategy.en.mfa>
- Akgül, M., & Akgül, Ç. G. (2022). "Beyond Mutually Hurting Stalemate: Why Did the Peace Process in Turkey (2009–2015) Fail? *Turkish Studies*, 24(1), 1–28.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14683849.2022.2085094>
- Bahgat, G. (2006). Europe's Energy Security: Challenges and Opportunities. *International Affairs*, 82(5), 961–971.
- Buhari Gulmez, D. (2020). The Resilience of the US–Turkey Alliance: Divergent Threat

- Perceptions and Worldviews. *Contemporary Politics*, 26(4), 475–492. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13569775.2020.1777038>
- Çelik, A. B. (2021). Inclusive citizenship and societal reconciliation within Turkey's Kurdish issue. *Southeast European and Black Sea Studies*, 21(2), 313–332.
- Cheng-Chwee, K. (2024). "Explaining Hedging: The Case of Malaysian Equidistance. *Contemporary Southeast Asia*, 46(1), 43–76. <https://www.jstor.org/stable/27301254>.
- Demir, C. K. (2024). Counter-terrorism in the age of hard power: reassessing Turkey's policy against the PKK. *Southeast European and Black Sea Studies*. <https://doi.org/10.1080/14683857.2024.2432719>
- Ege Bekdil, B. (2015). US Begins Removing Patriot Missiles from Turkey. In *Defense News*.
- Elmali-Karakaya, A. (2022). Interfaith Marriage in Islam: Classical Islamic Resources and Contemporary Debates on Muslim Women's Interfaith Marriages †. *Religions*, 13(8). <https://doi.org/10.3390/rel13080726>
- G. Thies, C. (2010). State Socialization and Structural Realism. *Security Studies*, 19(4), 689–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09636412.2010.524084>
- Ghariani, J. G. (2023). Turkish-Israeli Relations: 'The Golden Years', 1991–2000. *Israel Affairs*, 30(1), 5–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13537121.2023.2295602>
- Harknett, R. J., & Yalcin, H. B. (2012). The Struggle for Autonomy: A Realist Structural Theory of International Relations. *International Studies Review*, 14(4), 499–521. <http://www.jstor.org/stable/41804152>. Accessed 19 Oct. 2025.%0A%0A
- Heinrich, A., & Heiko Pleines. (2015). Mixing Geopolitics and Business: How Ruling Elites in the Caspian States Justify Their Choice of Export Pipelines. *Journal of Eurasian Studies*, 6(2), 107–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.euras.2015.03.003>
- Ioanes, E. (2022). Why the US doesn't want Turkey to invade Syria. *Vox*. <https://www.vox.com/2022/7/17/23259615/why-the-us-doesnt-want-turkey-to-invade-syria>
- Jones, S. (2025). Spain rejects NATO plan for member states to spend 5% of GDP on defence. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2025/jun/19/spain-rejects-nato-plan-for-member-states-to-spend-5-of-gdp-on-defence>
- K. Yanık, L. (2023). Turkey and the Russian Invasion of Ukraine: An Interplay of Bloc (De)Formation, Recognition and Asymmetric Interdependencies? *Globalizations*, 20(7), 1214–1226. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14747731.2023.2232189>
- kara, M. (2024). Hedging Strategy of Turkey in Great Power Competition. *Journal of Southeast European and Black Sea Studies*, 1–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14683857.2024.2352894>
- Korhan Demir, C. (2024). Counter-terrorism in the Age of Hard Power: Reassessing Turkey's Policy Against the PKK. *Journal of Southeast European and Black Sea Studies*, 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14683857.2024.2432719>
- Köstem, S. (2020). Russian-Turkish cooperation in Syria: geopolitical alignment with limits. *Cambridge Review of International Affairs*, 34(6). <https://doi.org/10.1080/09557571.2020.1719040>
- Kuik, C.-C. (2016). How do weaker states hedge? Unpacking ASEAN states' alignment behavior towards China. *Journal of Contemporary China*, 25(100), 500–514. <https://doi.org/10.1080/10670564.2015.1132714>
- Kutay, A. (2020). Turkey: the rise and fall of the influence of the military in politics. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1860>
- M., A. (2022). 70 YEARS IN NATO: TURKEY AS A STRATEGİC ALLIANCE. *Çanakkale Araştırmaları Türk Yılığ*, 21(33).
- McConnel, A. (2022). ANALYSIS - US support for PKK/PYD/YPG must end,"*AnadoluAgency*".
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The tragedy of great power politics*. W.W. Norton & Company.
- Öge, K. (2019). Understanding Pipeline Politics in Eurasia: Turkey's Transit Security in Natural Gas. *Geopolitics*, 26(5), 1510–1532. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14650045.2019.1687447>
- Pirani, S. (2018). After the Gazprom-Naftogaz Arbitration: Commerce Still Entangled in Politics. *Oxford Institute for Energy Studies*. <http://www.jstor.org/stable/resrep33895>

- Ronald D., A. (2008). Europe's Eastern Promise: Rethinking NATO and EU Enlargement. *Foreign Affairs*, 87(1), 95–106. <http://www.jstor.org/stable/20020270>
- Smith Stegen, K. (2011). Deconstructing the energy weapon: Russia's threat to Europe as case study. *Energy Policy*, 39(10), 6505–6513. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.07.051>
- Turkey Open TANAP Gas Pipeline. (2018). *DW*. <https://www.dw.com/en/turkey-opens-tanap-pipeline-that-will-bring-azeri-gas-to-europe/a-44192422>
- Vladimirov, M. (2025). TurkStream gas pipeline could slow EU-Russia decoupling. *Reuters*. <https://www.reuters.com/business/energy/turkstream-gas-pipeline-could-slow-eu-russia-decoupling-vladimirov-2025-05-07/>
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. Addison-Wesley.
- Yavuz, M. H. (2022). The motives behind the AKP's foreign policy: neo-Ottomanism and strategic autonomy. *Turkish Studies*, 23(5). <https://doi.org/10.1080/14683849.2022.2100700>
- Yetim, H. T., & Hazar, A. (2022). S400s, Sanctions and Defiance: Explaining Turkey's Quest for Strategic Autonomy and the US Response. *Journal of Southeast European and Black Sea Studies*, 23(1), 179–199. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14683857.2022.2095698>.
- Yılmaz, Ö. (2022). Turkey's Buffer Zone in Northern Syria and Its Impact on Irregular Migration. *Insight Turkey*, 24(Winter), 57–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.25253/99.2022241>.